



ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA PEMBIAYAAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2014-2016

Saputra, Reksy¹

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

E-mail: acunggbl@yahoo.co.id, Telp: +6285250585820

Abstract

*Reksy Saputra, **Revenue and Expense Analysis and Regional Financing At Samarinda City Government Fiscal Year 2014-2016**, under the guidance of Mrs. Dwi Risma Deviyanti as Supervisor I and Mrs. Musviyanti as Supervisor II. Using ratio analysis will be helpful in assessing the achievements of the past and future management prospects in the future. Ratios used can give an indication of whether the Government has managed to increase revenue growth in a positive or negative, describes the ability of the Government in the Fund's own governance activities, the dependence of the Government budget in the run to the transfer, the Government contribution in the realization of the local revenue and the level of achievement of a Government activity. Data collection techniques used are secondary data search with literature and manual. The data used in this research were collected by interview methods and methods of documentation.*

Based on the calculation of the ratios of Government results showed Samarinda City Government decrease on revenue growth, experience interval is said to be less because of the low PAD compared the transfer of Central Government, experience very high financial dependency, experience level of the role of the Central Government which is more dominant, less effective the level ratio 2014-2016 period of effectiveness. On the analysis of the ratio of the growth of the expenditures experience a decrease in spending budget, using the analysis of the ratio of direct and indirect expenditures on the Samarinda City Government shows the results that the Government has managed to allocate a budget of an existing well. On government efficiency ratio is quite efficient in putting pressure on the Government budget. Then on analysis of the ratio of the growth shows the result of SiLPA positive. The results of this research can be used as a reference for the company to take the decision in drafting the budget next year.

Keywords: Revenue, Expenditure and Financing



PENDAHULUAN

Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktek – praktek akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan, baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Entitas yang dimiliki pemerintah, baik itu lembaga pemerintah itu sendiri maupun organisasi nirlaba yang dimilikinya, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP itu sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mana sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Saat ini penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih terbentur berbagai kendala di lapangan. Sehingga masih banyak entitas pemerintah yang masih menerapkan basis kas menuju akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan APBD tidak akan terlepas dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena hal ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/ABPD serta untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu serta menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan layanan administratif dan infrastruktur publik melalui alokasi belanja daerah pada APBD. Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang - Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (Redaksi Great Publisher, 2009:206).

Komponen APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Belanja, terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sedangkan Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD tersebut berupaya mengelola setiap komponen dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2, tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas tiga elemen (pos) utama. Pertama adalah pos pendapatan yang didalamnya terdiri dari item Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Kedua adalah belanja yang didalamnya terdiri dari item belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Ketiga adalah pembiayaan yang didalamnya terdiri dari item penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan



daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. APBD yang direncanakan setiap tahun pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul apabila terjadi surplus atau defisit.

Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda nomor 11 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 20 (pasal 1) yang menjelaskan APBD merupakan satu-kesatuan yang terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan keuangan melalui rekening kas umum daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi dana ekuitas lancar. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada periode tahun anggaran berjalan ataupun tahun anggaran selanjutnya.

Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan.

Menurut data yang diperoleh dari pemerintah daerah Kota Samarinda diketahui bahwa anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.048.932.183.316,26, lebih kecil daripada anggaran tahun 2015 sebesar Rp3.615.371.904.433,00. Jika dilihat dari data, hal ini disebabkan karena meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sebesar 70,48% dan pendapatan transfer sebesar 61,13%. Namun jika dibandingkan antara tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, anggaran Pendapatan Daerah mengalami penurunan menjadi Rp2.613.861.928.835. Hal ini disebabkan karena item Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun menjadi sebesar 57,27% dan pendapatan transfer sebesar 74,47%.

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.890.928.664.090,00, lebih rendah daripada anggaran tahun 2015 sebesar Rp4.065.235.714.751,48. Jika dilihat dari data, hal ini disebabkan karena meningkatnya belanja operasi pada tahun 2015 sebesar 90,60% dan menurunnya belanja modal tahun 2015 sebesar 97,44% dan belanja tak terduga sebesar 76,14%. Penurunan tersebut juga terjadi terhadap anggaran Belanja Daerah tahun 2016 sebesar Rp2.624.916.838.977,28, hal ini disebabkan karena berkurangnya nilai belanja operasi sebesar 80,27% , belanja modal 43,41% dan belanja tak terduga 78,80%.

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2014 yang tersedia ialah sebesar Rp841.996.480.773,74, nilai tersebut lebih tinggi daripada tahun anggaran 2015 sebesar Rp449.863.810.318,48. Hal ini disebabkan ketika tahun anggaran 2015 terjadi pengeluaran pembiayaan pada item penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp35.172.607.174,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 penurunan nilai pembiayaan yang dianggarkan menurun secara signifikan sebesar Rp11.054.910.142,01, hal ini disebabkan karena SiLPA sebesar Rp73.457.600.107,89 hanya dipergunakan untuk melakukan pembayaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp62.402.689.965,88.



KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Halim (2011:36), akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat meliputi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2011:40), akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (2007:252) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan dan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurut Mardiasmo (2002:14), akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian, manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Sedangkan menurut Bastian (2006:15), akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Anggaran Sektor Publik

menurut Mardiasmo (2002:62) adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Mardiasmo, 2002:62).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

menurut Mahmudi (2010:142) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Mardismo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.



Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

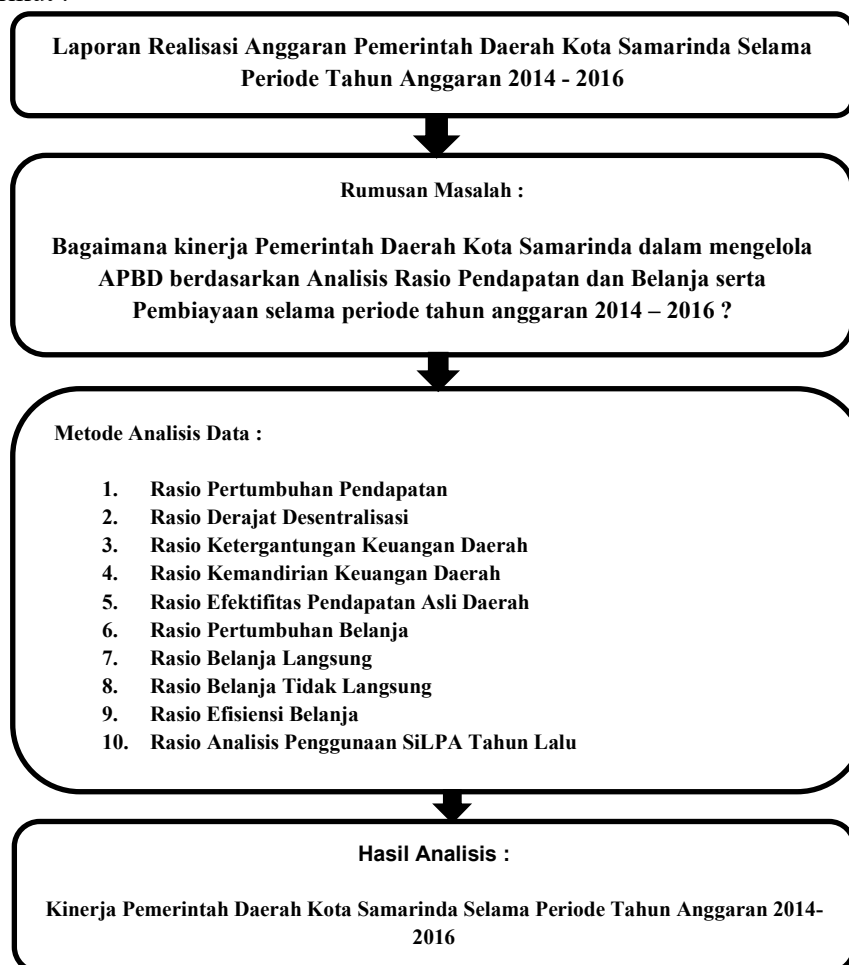
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2010:280), laporan Realisasi Anggaran adalah menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif.

Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka pikir penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara menurut Sugiyono (2010:194) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan hasil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Metode dokumentasi merupakan proses penghimpunan informasi dan data melalui metode studi pustaka, mengkaji jurnal dan eksplorasi literatur-literatur dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan (Sugiyono, 2014:326). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.
- Informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alat Analisis

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan daerah. Analisis dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : Analisis rasio pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja langsung, rasio belanja tidak langsung, rasio efisiensi belanja, dan rasio analisis penggunaan SiLPA tahun lalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 4.1.
Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun Anggaran	Pendapatan Th_t	Pendapatan Th_{t-1}	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Kriteria Kemampuan
2014	2.845.036.423.374,66	2.567.632.606.693,65	10,80%	Positif
2015	2.859.356.289.674,01	2.845.036.423.374,66	0,50%	Positif
2016	2.437.626.649.388,97	2.859.356.289.674,01	-14.79%	Negatif
Rata-Rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan			-1.16%	Negatif

Sumber : data diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang negatif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama periode 2014 - 2016 adalah sebesar -1,16%. Pada tahun 2014 rasio pertumbuhan pendapatan mencapai 10,80%, kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,50%, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan sebesar -14,79%.



Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 4.2.
Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2014	435.498.980.673,66	2.845.036.423.374,66	15,31%	Kurang
2015	419.745.787.641,01	2.859.356.289.674,01	14,68%	Kurang
2016	391.404.293.290,97	2.437.626.649.388,97	16,06%	Kurang
Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi			15,35%	Kurang

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.2. tingkat derajat desentralisasi pemerintah daerah Kota Samarinda mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi selama periode 2014 – 2016 adalah sebesar 15,35%. Pada tahun 2014 tingkat derajat desentralisasi sebesar 15,31%, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 14,68% dan untuk tahun 2016 tingkat derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,06%.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4.3.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
2014	1.721.772.679.351,00	2.845.036.423.374,66	60,51%	Sangat Tinggi
2015	2.439.596.410.283,00	2.859.356.289.674,01	85,32%	Sangat Tinggi
2016	2.046.222.356.098,00	2.437.626.649.388,97	83,94%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah			76,59%	Sangat Tinggi

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.3. tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah di tahun 2014 sebesar 60,51%, lalu pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 85,32%, namun pada tahun 2016 tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah pendapatan daerah mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 83,94%.

Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Tabel 4.4.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Transfer Pusat + Propinsi	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Pola Hubungan
2014	435.498.980.673,66	1.721.772.679.351,00	25,29%	Konsultatif
2015	419.745.787.641,01	2.439.596.410.283,00	17,20%	Instruktif
2016	391.404.293.290,97	2.046.222.356.098,00	19,13%	Instruktif
Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			20,54%	Instruktif

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.4. tingkat kemandirian keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah di tahun 2014 sebesar 25,29%, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 17,20%, namun



pada tahun 2016 tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 19,13%.

Rasio Efektifitas PAD

Tabel 4.5
Rasio Efektifitas PAD

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas PAD (%)	Penilaian Efektifitas PAD
2014	435.498.980.673,66	577.555.670.510,00	75,40%	Kurang Efektif
2015	419.745.787.641,01	819.500.000.000,00	51,22%	Tidak Efektif
2016	391.404.293.290,97	469.371.060.803,39	83,39%	Kurang Efektif
Rata-Rata Rasio Efektifitas PAD			70,17%	Tidak Efektif

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.5, tingkat rasio efektifitas pada Pendapatan Asli Daerah keuangan pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2014 sebesar 75,40%, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 51,22%, namun pada tahun 2016 tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 83,39%.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 4.6.
Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun Anggaran	Belanja Th t	Belanja Th (t-1)	Rasio Pertumbuhan Belanja (%)	Kriteria Kemampuan
2014	3.201.662.936.936,86	2.869.579.631.651,84	11,57%	Positif
2015	3.237.540.741.278,13	3.201.662.936.936,86	1,12%	Positif
2016	2.331.928.898.582,64	3.237.540.741.278,13	-27,97%	Negatif
Rata-Rata Rasio Pertumbuhan Belanja			-5,09%	Negatif

Sumber : data diolah oleh penulis.

Berdasarkan dari hasil tabel 4.6 analisis pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2014-2016 menunjukan adanya pertumbuhan belanja yang menurun dan cenderung negatif tiap tahunnya. Pada tahun 2014 pertumbuhan belanja adalah sebesar 11,52% , tahun 2015 pertumbuhan belanja adalah sebesar 1,12% dan tahun 2016 adalah sebesar -27,97%, sehingga dalam periode 2014-2016 menghasilkan rata-rata sebesar -5,09.

Rasio Belanja Langsung

Tabel 4.7.
Rasio Belanja Langsung

Tahun Anggaran	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung (%)
2014	3.039.937.963.018,00	3.201.662.936.936,86	94,95%
2015	3.062.349.707.969,00	3.238.561.121.093,13	94,56%
2016	2.297.502.565.074,00	2.331.928.898.582,64	98,52%
Rata-Rata Rasio Belanja Langsung			96,01%

Sumber : data diolah oleh penulis.



Berdasarkan tabel 4.7, tingkat rasio belanja langsung keuangan pemerintah daerah tahun 2014 sebesar 94,95%, lalu pada tahun 2015 relatif stabil sebesar 94,56%, namun pada tahun 2016 belanja langsung pemerintah daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 98,52%. Rata-rata rasio belanja langsung selama periode 2014-2016 adalah sebesar 96,01%.

Rasio Belanja Tidak Langsung

Tabel 4.8.
Rasio Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung (%)
2014	1.374.068.622.150,00	3.201.662.936.936,86	42,92%
2015	1.214.661.865.104,00	3.238.561.121.093,13	37,51%
2016	1.051.278.461.542,00	2.331.928.898.582,64	45,08%
Rata-Rata Rasio Belanja Tidak Langsung			41,84%

Sumber : data diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, tingkat rasio belanja tidak langsung keuangan pemerintah daerah tahun 2014 sebesar 42,92%, lalu pada tahun 2015 tingkat rasio mengalami penurunan sebesar 37,51%, namun pada tahun 2016 belanja tidak langsung pemerintah daerah mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 45,08%. Rata-rata rasio belanja tidak langsung selama periode 2014-2016 sebesar 41,84%.

Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 4.9.
Rasio Efisiensi Belanja

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja
2014	3.201.662.936.936,86	3.890.928.664.090,00	82,28%	Cukup Efisien
2015	3.237.540.741.278,13	4.063.842.554.801,48	79,67%	Efisien
2016	2.331.928.898.582,64	2.624.916.838.977,28	88,34%	Cukup Efisien
Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja			83,43%	Cukup Efisien

Sumber : data diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel 4.9. diatas dapat dilihat untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 tingkat efisiensi belanja daerah dapat dikatakan pemerintah Kota Samarinda melakukan penghematan anggaran. Pada tahun 2014 tingkat efisiensi belanja daerah mencapai 82,28%, kemudian ditahun 2015 mengalami penghematan sebesar 2,61% menjadi 79,67%, dan pada tahun 2016 tingkat efisiensi belanja daerah sebesar 88,34%. Rata-rata tingkat rasio efisiensi belanja selama periode tahun 2014-2016 sebesar 83,43%.

Rasio Pertumbuhan SiLPA Tahun Lalu

Tabel 4.10.
Laporan Perkembangan Surplus/Defisit dan Pertumbuhan SiLPA



Tahun	Realisasi						
	Pendapatan	Belanja	Surplus (Defisit)	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Neto	SILPA
2014	2.845.036.423.374,66	3.201.662.936.936,86	(356.626.513.562)	842.496.480.773,74	333.549.719,06	842.162.931.054,68	485.536.417.492,48
2015	2.859.356.289.674,01	3.237.540.741.278,13	(379.204.831.419,12)	485.536.417.492,48	32.873.985.965,47	452.662.431.527,01	73.457.600.107,89
2016	2.437.626.649.388,97	2.331.928.898.582,64	105.697.750.806,33	73.457.600.107,89	-	73.457.600.107,89	179.155.350.914,22

Sumber: data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.10. diatas dapat dilihat untuk tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikarenakan melonjaknya jumlah belanja daerah tetapi tidak diimbangi oleh jumlah pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2016 APBD pemerintah daerah Kota Samarinda terjadi surplus hal ini dikarenakan jumlah pendapatan daerah lebih besar daripada jumlah belanja daerah.

PEMBAHASAN

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Pada tahun 2014 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar **10,80%**, dalam tahun ini pemerintah Kota Samarinda dapat dikatakan mengalami trend yang positif. Pencapaian pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2014 dikarenakan kenaikan dalam realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan tahun lalu, kenaikan tersebut karena meningkatnya realisasi pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp435.498.980.673,66 dibanding tahun lalu sebesar Rp338.158.272.078,65, kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut dikarenakan pemerintah Kota Samarinda berhasil memenuhi realisasi pendapatan pajak lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp238.511.683.138,63 sedangkan tahun lalu hanya sebesar Rp197.814.938.240,07, kemudian realisasi pendapatan retribusi juga lebih besar dari tahun lalu yaitu sebesar Rp66.907.582.372,00 dimana tahun lalu hanya mencapai Rp55.565.910.941,13, dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga lebih besar dari tahun lalu yaitu sebesar Rp124.983.014.105,03 sedangkan tahun lalu hanya mencapai Rp78.952.990.584,69.

Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015 turun menjadi **0,50%**, angka tersebut diperoleh setelah membandingkan realisasi pendapatan tahun 2015 yang sebesar Rp2.859.356.289.674,01 dengan realisasi pendapatan tahun 2014 yang sebesar Rp2.845.036.423.374,66 sehingga memperoleh rasio sebesar 0,50%, namun pencapaian tersebut masih dapat dikatakan positif karena Pemerintah Daerah Kota Samarinda berhasil memperoleh realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan daerah pada tahun 2015 ini naik tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp419.745.787.641,01 dibanding tahun lalu sebesar Rp435.498.980.673,66, penurunan tersebut dikarenakan realisasi pendapatan retribusi daerah dari tahun lalu sebesar Rp66.907.582.372,00 turun menjadi Rp61.824.059.131,00, Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun lalu juga mengalami penurunan dimana tahun lalu mencapai Rp5.096.701.058,00 menjadi Rp4.776.018.600,80 pada tahun 2015, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dari Rp124.983.014.105,03 menjadi Rp109.066.493.311,87 dibanding tahun lalu.

Perubahan penurunan rasio pertumbuhan pendapatan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar **-14,79%**, dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda dapat dikatakan mengalami kecenderungan trend yang negatif. Pada tahun ini penurunan rasio dan nilai pendapatan daerah disebabkan karena terjadinya penurunan realisasi pendapatan daerah dari tahun lalu, dimana pada tahun 2016 ini Pemerintah Kota Samarinda memperoleh realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.437.626.649.388,97 sedangkan tahun lalu mencapai realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.859.356.289.674,01.

Penurunan pendapatan daerah terjadi karena nilai-nilai pada item pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah juga ikut menurun, dimana jumlah pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp391.404.293.290,97 sedangkan tahun lalu mencapai Rp419.745.787.641,01. Rendahnya pendapatan asli daerah dikarenakan tidak begitu besarnya perolehan realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp256.130.052.909,60, namun nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan perolehan realisasi pendapatan pajak tahun lalu yang hanya mencapai Rp244.079.216.59. Rendahnya pula



realisasi pendapatan retribusi daerah dibandingkan tahun lalu ikut mempengaruhi menurunnya nilai pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2016 ini Pemerintah Kota Samarinda hanya memperoleh pendapatan retribusi sebesar Rp58.591.942.122,00 sedangkan tahun lalu memperoleh pendapatan sebesar Rp61.824.059,13, serta rendahnya realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibanding tahun lalu juga mempengaruhi turunnya nilai pendapatan asli daerah, dimana nilai realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp72.322.556.867,35 lebih rendah dari tahun lalu yang memperoleh angka sebesar Rp109.066.493,31.

Rasio Derajat Desentralisasi

Pada tahun 2014 tingkat derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda adalah sebesar **15,31%**, dan termasuk dalam kriteria kurang, hal ini diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp435.498.980.673,66 dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah sebesar Rp2.845.036.423.374,66. Nilai pada realisasi pendapatan asli daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai dari realisasi dana perimbangan/pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang memperoleh nilai sebesar Rp1.721.772.679.351,00 dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp687.764.763.350,00, hal ini tentu saja mengakibatkan tingkat rasio yang rendah atau kurang bagi Pemerintah Kota Samarinda karena apabila nilai realisasi Pendapatan Asli Daerahnya lebih kecil dibandingkan dengan item pendapatan yang lainnya seperti dana perimbangan/pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah bisa dikatakan pemerintah kurang kontribusinya dalam melaksanakan pendapatan daerah dan kurang memaksimalkan kemampuan keuangannya dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerahnya seperti pajak dan retribusi daerah. Jika dilihat, pendapatan asli daerah yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak sebesar Rp238.511.683.138,63 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp66.907.582.372,00, serta realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp124.983.014.105,03 nilai tersebut jika dijumlahkan bahkan lebih kecil dari realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak yang sebesar Rp789.197.655.125,00.

Pada tahun 2015 tingkat derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda mengalami penurunan menjadi **14,68%**, dan termasuk dalam kriteria kurang, hal ini disebabkan karena nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp419.745.787.641,01 lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp435.498.980.673,66, namun realisasi Total Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yaitu Rp2.859.356.289.674,01. Berkurangnya nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah dikarenakan berkurangnya pencapaian dalam realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp61.824.059.131,00 dimana tahun lalu mencapai Rp66.907.582.372,00, dan turunnya pula realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp109.066.493.311,87 dimana tahun lalu mencapai Rp124.983.014.105,03.

Meningkatnya realisasi total pendapatan daerah lebih besar dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, realisasi pendapatan transfer dari pusat mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dimana pada tahun 2015 ini Pemerintah Kota Samarinda berhasil mengumpulkan realisasi sebesar Rp1.542.417.499.483,00 dimana tahun lalu hanya mencapai realisasi sebesar Rp1.538.150.053.351,00. Pada pendapatan transfer dan bantuan keuangan pemerintah provinsi juga mengalami peningkatan dalam realisasinya dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp688.628.384.800,00 sedangkan tahun lalu hanya sebesar Rp687.750.671.600,00, dan kemudian meningkatnya realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp.208.550.526.000,00 dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp183.622.628.000,00. Penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan naiknya realisasi total pendapatan daerah mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda semakin kurang kontribusinya terhadap capaian dalam melaksanakan realisasi penerimaan pendapatan daerahnya.

Pada tahun 2016 tingkat rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda mengalami kenaikan yaitu sebesar **16,06%**, kenaikan tersebut dikarenakan nilai pada Pendapatan Asli Daerah yang sebesar Rp391.404.293.290,97, diikuti dengan rendahnya realisasi total pendapatan daerah sebesar Rp2.437.626.649.388,97, tingkat derajat desentralisasi yang diperoleh masih termasuk dalam kriteria kurang.

Penurunan yang terjadi pada realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi total pendapatan daerah disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah dibanding tahun lalu, dimana pada tahun 2016 realisasi pendapatan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda hanya



sebesar Rp58.591.942.122,00 sedangkan tahun lalu realisasi yang diterima sebesar Rp61.824.059,13, dan rendahnya realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar sebesar Rp73.322.556.867,35 sedangkan tahun lalu realisasi yang diterima mencapai Rp109.066.493,31.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan analisis yang dilakukan pada pemerintah daerah Kota Samarinda, yakni tahun 2014 nilai rasio ketergantungan keuangan daerah sudah sangat tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu sebesar **60,51%**, hal ini tentu saja disebabkan karena sebagian besar pendapatan daerah dihasilkan dari realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.721.772.679.351,00, bahkan nilai tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp435.498.980.673,66 dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp687.764.763.350,00.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2014 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana realisasi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang diterima pada tahun ini sebesar Rp917.512.184.351,00 sedangkan tahun lalu hanya memperoleh penerimaan sebesar Rp876.761.756.065,00, lalu penerimaan pada realisasi dana alokasi umum juga mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar Rp614.366.913.000,00 dimana tahun lalu hanya memperoleh penerimaan sebesar Rp579.634.968.000,00, namun pada tahun ini realisasi pada dana alokasi khusus mengalami penurunan dibanding tahun lalu yaitu sebesar Rp6.270.954.000,00 dimana pada tahun lalu penerimaan yang diperoleh sebesar Rp8.994.126.000,00.

Lalu pada tahun 2015, tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar **85,32%**, nilai tersebut bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Samarinda mendapatkan dana lebih besar dari tahun lalu dari realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.439.596.410.283,00, penerimaan terbesar dalam pendapatan transfer pemerintah pusat diperoleh dari jumlah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp854.615.434.483,00 namun kali ini nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana Pemerintah Kota Samarinda memperoleh realisasi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp917.512.184.351,0. Nilai yang mempengaruhi besarnya realisasi pendapatan transfer pada tahun ini dikarenakan adanya penerimaan dari pemerintah provinsi, dimana Pemerintah Kota Samarinda memperoleh realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp314.849.684.800,00 dan bantuan keuangan dari provinsi lainnya sebesar Rp373.778.700.000,00.

Tahun 2016 tidak berbeda jauh dengan tahun 2015, pada tahun 2016 ini nilai realisasi pendapatan transfer berjumlah Rp2.046.222.356.098,00, jika angka tersebut dibagi dengan realisasi total pendapatan daerah sebesar Rp2.437.626.649.388,97, maka akan menghasilkan tingkat ketergantungan keuangan **83,94%**. Realisasi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tahun ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, artinya tiap tahun Pemerintah Kota Samarinda mengalami pengurangan dalam penerimaan realisasi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 nilai pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang diperoleh sebesar Rp695.992.672.611,00 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp854.615.434.483,00, namun nilai tersebut tetap merupakan pendapatan terbesar dalam pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Realisasi total pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp1.622.965.303.098,00, kemudian ditambah dengan nilai realisasi dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp423.257.053.000,00 maka akan menghasilkan total pendapatan daerah sebesar Rp2.046.222.356.098. Nilai Pendapatan Transfer tersebut dianggap terlalu tinggi dalam ketergantungan keuangan daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang sebesar Rp2.437.626.649.388,97. Nilai pendapatan transfer yang besar tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kota Samarinda, semakin besar nilai yang didapat dari pendapatan transfer maka semakin tinggi pula ketergantungan yang dihasilkan, tentu saja hal ini akan mempengaruhi nilai kinerja pemerintahan Kota Samarinda dalam mengelola keuangan APBD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tahun 2014, tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Samarinda yaitu sebesar **25,29%**, hal ini dapat dikatakan konsultatif dalam pola hubungan kemandiriannya dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan dikatakan rendah dalam menghasilkan kemampuan



keuangan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat rasio yang rendah tersebut dikarenakan nilai pada realisasi Pendapatan Asli Daerah yang kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatannya dalam mencapai realisasi pendapatan yang ditargetkan, nilai Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada tahun 2014 ini sebesar Rp435.498.980.673,66, nilai tersebut dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan keuangannya karena Pemerintah Kota Samarinda memperoleh pendapatan lebih besar dari transfer pusat sebesar Rp1.538.150.051.351,00 dan menerima realisasi pendapatan dari transfer pusat lainnya sebesar Rp183.622.628.000,00. Namun pada pola hubungan yang konsultatif ini dapat dikatakan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena Pemerintah Kota Samarinda dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pada tahun 2015, tingkat rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Samarinda sebesar **17,20%**, pada tahun 2015 ini Pemerintah Kota Samarinda dikatakan Instrukturif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan, karena kemampuan keuangan daerah Kota Samarinda masih sangat rendah sekali, pada tahun ini Pemerintah Kota Samarinda mengalami penurunan dalam realisasi Pendapatan Asli daerahnya dibandingkan dengan tahun lalu, dimana pada tahun ini nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh sebesar Rp419.745.787.641,01 sedangkan tahun lalu memperoleh realisasi sebesar Rp435.498.980.673,66. Penurunan tersebut dikarenakan tidak maksimalnya pencapaian pendapatan pada realisasi pendapatan retribusi yang hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp61.824.059.131,00 dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp66.902.582.372,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dihasilkan juga lebih rendah dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp4.776.018.600,80 sedangkan tahun lalu mencapai realisasi sebesar Rp5.096.701.058,00, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp109.066.493.311,87 dimana tahun lalu mencapai realisasi sebesar Rp124.983.014.105,03.

Nilai yang dihasilkan dari transfer pusat dan provinsi pada tahun ini berbanding terbalik dengan nilai yang dihasilkan oleh PAD, dimana pada tahun ini nilai pendapatan transfer pusat dan provinsi justru mengalami kenaikan dalam hal penerimaan realisasinya. Nilai pendapatan yang diperoleh dari realisasi transfer pusat sebesar Rp1.750.968.025.483,00, tentu saja hal ini lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan transfer pusat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp1.538.150.051.351,00. Kemudian penerimaan yang dari transfer provinsi juga mengalami kenaikan sebesar Rp688.628.384.800,00 dimana tahun lalu hanya memperoleh realisasi sebesar Rp183.622.628.000,00. Kenaikan yang terjadi pada transfer pusat dan provinsi dikarenakan tingginya penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Samarinda dari dana alokasi khusus sebesar Rp97.568.524.000,00 dimana tahun lalu hanya tercapai realisasinya sebesar Rp6.270.954.000,00, dan tingginya penerimaan dari dana penyesuaian sebesar Rp208.550.526.000,00 dimana tahun lalu hanya mencapai Rp183.622.628.000,00.

Pada tahun 2016 tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Samarinda hanya mencapai **19,13%**, nilai tersebut dikatakan instruktif dan dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Samarinda masih sangat rendah sekali dalam melaksanakan kegiatan kemandirian yang menghasilkan sumber pendapatan bagi daerah. Rendahnya kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam kegiatan kemandiriannya pada tahun 2016 dikarenakan nilai realisasi transfer pusat yang sebesar Rp1.622.965.303.098,00 ditambah dengan nilai realisasi transfer provinsi sebesar Rp423.257.053.000,00 yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda begitu tinggi sehingga berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahunnya semakin mengalami penurunan khususnya pada tahun 2016 ini, nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp391.404.293.290,97 dimana tahun lalu nilai realisasinya sebesar Rp419.745.787.641,01. Penurunan nilai pada Pendapatan Asli Daerah tersebut dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi pendapatan retribusi daerah dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar Rp58.591.942.122,00 sedangkan tahun lalu nilai realisasi yang dicapai sebesar Rp61.824.059.131,00, dan rendahnya pula realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.359.741.392,02 dimana tahun lalu mencapai realisasi sebesar Rp4.776.018.600,80, serta rendahnya pula realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp72.322.556.867,35 dimana tahun lalu mencapai realisasi sebesar Rp109.066.493.311,87.



Rasio Efektifitas PAD

Pada tahun 2014 tingkat efektifitas Pemerintah Kota Samarinda sebesar **75,40%** atau dengan kata lain kemampuan pemerintah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dinilai kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan yang ditentukan, sebab pemerintah tidak dapat mencapai realisasi penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp577.555.670.510,00, dimana pemerintah hanya berhasil menghimpun realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp435.498.980.673,66, hal ini disebabkan karena tidak tercapainya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp41.119.258.301,00 namun pemerintah Kota Samarinda hanya berhasil merealisasikan dana sejumlah Rp5.096.701.058,00.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga tidak memenuhi target harapan pemerintah Kota Samarinda dimana target yang ditentukan sebesar Rp246.257.135.452,00 namun Pemerintah Kota Samarinda hanya mendapatkan realisasi sejumlah Rp124.983.014.105,03, tentu saja hal ini menyebabkan Pemerintah Kota Samarinda tidak mencapai target yang diharapkan karena tidak optimalnya kinerja pada sektor pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pada tahun 2015 tingkat efektifitas Pemerintah Kota Samarinda sebesar **51,22%**, dengan kata lain kemampuan efektifitas PAD Pemerintah Kota Samarinda dikatakan tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan pendapatan pajak daerah yang ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp257.845.000.000,00 tetapi tidak tercapai, dimana pendapatannya hanya terealisasi sejumlah Rp244.079.216.597,34, lalu pendapatan retribusi daerah juga tidak bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp73.541.962.180,00, dimana hanya mencapai realisasi sejumlah Rp61.824.059.131,00, begitu pula pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga tidak berhasil mencapai target yang ditentukan sebesar Rp20.832.762.532,00, dimana pendapatannya hanya terealisasi sebesar Rp4.776.018.600,80.

Target yang tidak tercapai begitu besar terjadi pada Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp4627.280.275.288,00, namun pendapatan yang terealisasi hanya sebesar Rp109.066.493.311,87. Dari banyaknya semua kegiatan yang dilakukan tidak mencapai target pada Pendapatan Asli Daerah, hal ini tentu saja penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kota Samarinda bisa dikatakan tidak efektif, karena hal ini jika dibandingkan total target PAD yang ditetapkan sebesar Rp819.500.000.000,00, lalu realisasi pendapatan yang tercapai hanya sebesar Rp419.745.787.641,01, hal ini disebabkan karena tidak optimalnya semua kegiatan pada semua sektor program Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2016 tingkat efektifitas Pemerintah Kota Samarinda sebesar **83,39%** atau dengan kata lain kemampuan pemerintah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih dinilai kurang efektif. Pemerintah Kota Samarinda meminimalisir target penerimaan yang ditetapkan, mungkin saja hal ini diberlakukan guna untuk mencegah terjadinya pengeluaran dana (*outcome*) yang tidak perlu sesuai kebijakan presiden pada tahun tersebut.

Pada tahun 2016, pemerintah Kota Samarinda menetapkan target anggaran sebesar Rp469.371.060.803,39. Namun pada tahun 2016 ini pemerintah belum bisa mengoptimalkan seluruh kegiatan tersebut dimana semua target PAD yang ditetapkan seperti Pajak daerah, Retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak mencapai target seluruhnya. Sehingga realisasi PAD yang didapat pemerintah Kota Samarinda hanya sejumlah Rp391.404.293.290,97.

Realisasi penerimaan PAD yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap target penerimaan PAD memiliki perbandingan selisih yang tidak besar, dimana pada tahun 2016 ini selisih antara realisasi dari target penerimaan PAD tidak melebihi 100 Miliar rupiah bahkan cenderung kebawah yaitu jika dihitung hanya mencapai Rp77.966.767.512,42, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana realisasi terhadap target yang ingin dicapai mencapai ratusan miliar rupiah lebih. sehingga Rasio efektifitas PAD mencapai 83,39%, namun masih dikatakan kurang efektif karena kurang dari 90%.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan realisasi belanja pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2014 adalah **11,57%**, nilai tersebut diperoleh karena kenaikan pada nilai jumlah realisasi belanja daerah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu yang sebesar Rp3.201.662.936.936,86, dimana pada tahun



sebelumnya nilai yang terealisasi hanya sebesar Rp2.869.579.631.651,84, kenaikan pada nilai realisasi jumlah belanja daerah dikarenakan meningkatnya jumlah belanja operasi pada tahun 2014 sebesar Rp1.878.908.770.615,86 jika dibandingkan dengan belanja operasi pada tahun lalu yang hanya menerima realisasi sebesar Rp1.589.035.523.996,84. Meningkatnya belanja operasi pada tahun ini dikarenakan penerimaan yang diperoleh pada realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, seperti realisasi pegawai dimana pada tahun 2014 Pemerintah Kota Samarinda merealisasikan belanjanya sebesar Rp1.212.343.648.232,00 sedangkan tahun lalu hanya merealisasikan belanjanya sebesar Rp1.165.957.564.208,50, lalu pada realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp504.938.020.140,34 sedangkan tahun lalu hanya merealisasikan belanja barang dan jasanya sebesar Rp367.304.432.455,21, serta belanja hibah yang juga mengalami kenaikan dalam realisasinya dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp159.146.356.890,00 dimana tahun lalu hanya terealisasi sebesar Rp53.568.466.000,00.

Pada item realisasi belanja modal juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.332.656.294.646,00 dimana pada tahun lalu Pemerintah Kota Samarinda hanya merealisasikan belanja modalnya sebesar Rp1.280.544.107.655,00. Peningkatan pada belanja modal tersebut dikarenakan naiknya nilai realisasi pada belanja gedung dan bangunan sebesar Rp398.119.095.329,00 dimana tahun lalu Pemerintah Kota Samarinda hanya merealisasikan belanja gedung dan bangunannya sebesar Rp276.508.610.229,00, dan naiknya realisasi belanja aset lainnya dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp15.393.969.625,00 dimana tahun lalu hanya terealisasi belanja aset lainnya sebesar Rp14.832.054.912,00. Nilai yang mempengaruhi meningkatnya realisasi belanja daerah pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun lalu karena terdapat realisasi belanja tak terduga sebesar Rp97.871.675,00, dimana pada tahun lalu Pemerintah Kota Samarinda tidak terdapat nilai dalam belanja tak terduganya.

Pada tahun 2015 tingkat rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Samarinda mengalami penurunan yaitu sebesar **1,12%**, hasil tersebut diperoleh dari perhitungan nilai realisasi belanja daerah pada tahun 2015 dibandingkan dengan nilai realisasi belanja daerah pada tahun 2014. Nilai realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp3.237.540.741.278,13, naik sekitar 35 Miliar rupiah jika dibandingkan dengan jumlah belanja pada tahun 2014 yang berjumlah Rp3.201.662.936.936,86, hal ini disebabkan karena trend pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2015 dan 2014 relatif stabil dimana angka nilai realisasi belanja operasi tidak mengalami kenaikan terlalu tinggi, dimana nilai belanja operasi pada tahun 2015 sebesar Rp2.027.136.296.511,36 sedangkan belanja operasi tahun 2014 sebesar Rp1.878.069.668.578,86. Kenaikan pada belanja operasi tersebut dikarenakan realisasi pada belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp813.270.571.725,38 dimana tahun lalu hanya terealisasi belanjanya sebesar Rp504.938.020.140,34, dan realisasi belanja hibah yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp173.704.986.100,00.

Pada item belanja modal pada tahun 2015 Pemerintah Kota Samarinda mengalami penurunan dikarenakan rendahnya belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan sehingga jumlah belanja modal hanya mendapatkan dana sebesar Rp1.209.608.304.448,57, sedangkan tahun 2014 nilai belanja modal sejumlah Rp1.322.656.294.646,00. Penurunan pada realisasi belanja modal tersebut dikarenakan menurunnya realisasi pada belanja peralatan dan mesin jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp51.091.443.082,57 dimana tahun lalu terealisasi sebesar Rp96.136.272.884,00. Realisasi belanja gedung dan bangunan pada belanja modal juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp209.887.813.086,00 dimana tahun lalu realisasi belanjanya lebih besar yaitu sejumlah Rp398.119.095.329,00. Nilai yang menurun pada sub-item belanja modal sangat mempengaruhi nilai pada total belanja daerah secara keseluruhan, sehingga apabila nilai realisasi semakin menurun maka akan mengalami kecenderungan kearah yang negatif dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah.

Pada tahun 2016 tingkat rasio pertumbuhan belanja mengalami penurunan yang signifikan dari tahun lalu karena rasio pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kota Samarinda memperoleh rasio minus dibawah **-27,97%**. Belanja operasi yang tidak menambah nilai bisa dihilangkan dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal terjaga, dapat dilihat pada realisasi jumlah belanja tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.331.928.898.582,64, berbeda jauh dengan tahun sebelumnya dimana nilai realisasi jumlah belanja pada tahun lalu sebesar



Rp3.237.540.741.278,13, hal ini dikarenakan pada belanja operasi terdapat sub-item yang tidak dianggarkan pada belanja bunga dan belanja bantuan sosial pada tahun tersebut, selain dihilangkannya belanja bunga dan belanja bantuan sosial terjadinya juga pengurangan realisasi pada belanja barang dan jasa dibandingkan dengan tahun lalu dimana yaitu sebesar Rp584.913.260.321,64, dan pengurangan tersebut terjadi juga pada realisasi belanja hibah sebesar Rp31.691.725.000,00 dimana tahun lalu teralisasi sebesar Rp173.704.986.100,100.

Pada realisasi belanja modal juga mengalami penurunan daripada tahun lalu, realisasi belanja modal pada tahun ini sebesar Rp695.737.176.719,43 sedangkan tahun lalu realisasi belanja modal sebesar Rp1.209.608.304.448,57. Penurunan realisasi belanja tersebut dikarenakan menurunnya nilai realisasi pada belanja modal tanah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp7.750.309.710,00 dimana tahun lalu terealisasi belanjanya sebesar Rp39.494.693.168,00, lalu pada realisasi belanja peralatan dan mesin juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp36.543.957.650,43 dimana tahun lalu terealisasi sebesar Rp51.091.443.082,57, penurunan juga terjadi pada realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp124.470.965.823,00 dimana tahun lalu realisasi belanjanya sebesar Rp209.887.813.086,00, lalu pada realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan yang juga mengalami penurunan dari tahun lalu yaitu sebesar Rp507.731.165.309,00 dimana tahun lalu terealisasi sebesar Rp887.406.010.787,00.

Rasio Belanja Langsung

Pada tahun 2014 pemerintah Kota Samarinda memperoleh persentase diangka **94,95%**, perolehan realisasi total belanja langsung didapat dari belanja pegawai yaitu sebesar Rp1.212.343.648.232,00, lalu realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp504.938.020.140,34, serta realisasi belanja modal sebesar Rp1.322.656.294.646,00, sehingga mendapatkan realisasi total belanja langsung sebesar Rp3.039.937.963.018,00.

Pada tahun 2014 ini pemerintah lebih besar mengeluarkan dana pada realisasi belanja modal terutama pada program belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp785.181.600.104,00 dan belanja gedung dan bangunan yang mencapai Rp398.119.095.329,00, serta belanja peralatan dan mesin sebesar Rp96.136.272.884,00, jika dijumlahkan maka akan menghasilkan dana sebesar Rp1.279.436.968.317,00, nilai tersebut bahkan lebih besar jika hanya dibandingkan dengan nilai belanja pegawai yang hanya sebesar Rp1.212.343.648.232,00, nilai tersebut hanya perhitungan dari ketiga sub-item belanja modal yang memerlukan dana modal yang besar, nilai tersebut masih diluar perhitungan belanja modal lainnya seperti belanja modal tanah yang sebesar Rp24.000.410.950,00, belanja aset tetap lainnya sebesar Rp3.824.945.754,00, dan belanja aset lainnya sebesar Rp15.393.969.625,00. Dalam hal ini dapat dikatakan pemerintah mengalokasikan dananya sesuai dengan yang direncanakan dimana keperluan belanja digunakan untuk kepentingan publik.

Pada tahun 2015 nilai realisasi belanja langsung Pemerintah Kota Samarinda mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp3.062.349.707.969,00, namun dalam hal persentase rasio belanja langsungnya mengalami penurunan yakni **94,56%** namun relatif wajar, hal ini disebabkan terjadinya penurunan terhadap belanja pegawai dan belanja modal, namun di satu sisi terjadi peningkatan terhadap belanja tak terduga. Pada belanja pegawai pemerintah Kota Samarinda hanya mengalokasikan dana sebesar Rp1.039.470.831.796,07 sedangkan tahun lalu realisasi belanja pegawainya sebesar Rp1.212.343.648.232,00, hal serupa juga terjadi pada belanja modal dimana Pemerintah Kota Samarinda hanya mengalokasikan jumlah belanja modal sebesar Rp1.209.608.304.448,57 sedangkan tahun lalu realisasi belanja modalnya sebesar Rp1.322.656.294.646,00. Pengurangan yang terjadi pada belanja modal dikarenakan menurunnya nilai realisasi belanja pada sub-item yang memerlukan dana besar seperti belanja gedung dan bangunan yang mengalokasikan dananya sebesar Rp209.887.813.086,00 sedangkan tahun lalu realisasinya sebesar Rp398.119.095.329,00, serta pengurangan terhadap belanja peralatan dan mesin dimana pemerintah hanya mengalokasikan dana realisasinya sebesar Rp51.091.443.082,57 dimana tahun lalu terealisasi sebesar Rp96.136.272.884,00, namun alokasi dana yang mengalami peningkatan dari tahun lalu terjadi pada sub-item realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan yaitu sebesar Rp887.406.010.787,00 dimana tahun lalu hanya sebesar Rp785.181.600.104,00.

Pada tahun 2016, persentase rasio belanja langsung mengalami kenaikan menjadi **98,52%**, kenaikan tingkat rasio belanja langsung tersebut dikarenakan rendahnya realisasi total belanja langsung pada tahun 2016 berimbas ikut mempengaruhi penurunan terhadap realisasi total belanja



daerah, dimana total belanja langsung sebesar Rp2.297.502.565.074,00, dan total belanja daerah sebesar Rp2.331.928.898.582,64. Pada tahun 2016 ini pemerintah Kota Samarinda seperti meminimalisir pengeluaran belanja pada belanja modal, hal ini dapat dilihat banyaknya program kegiatan yang dipangkas anggarannya serta pengeluaran yang lebih rendah dari tahun 2015, seperti belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Rasio Belanja Tidak Langsung

Tahun 2014 pemerintah Kota Samarinda dalam mengalokasikan dana belanja tidak langsung memperoleh persentase diangka **42,92%**. Perolehan total belanja daerah sebesar Rp3.201.662.936.936,86, dan total belanja tidak langsung sebesar Rp1.374.068.622.150,00. Dana belanja tidak langsung didapat dari belanja pegawai yaitu sebesar Rp1.212.343.648.232,00, lalu belanja bunga sebesar Rp49.643.316,52, belanja hibah sebesar Rp159.146.356.890,00, kemudian belanja bantuan sosial sebesar Rp1.592.000.000,00, serta belanja bantuan keuangan sebesar Rp839.102.037,00, dan belanja tak terduga sebesar Rp97.871.675,00.

Pada tahun 2015, tingkat rasio belanja tidak langsung pemerintah Kota Samarinda hanya mencapai **37,51%**, hal ini karena nilai total belanja tidak langsung pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun lalu sebesar Rp1.214.661.865.104,00 berbanding terbalik dengan total belanja daerah yang mengalami kenaikan Sebesar Rp3.238.561.121.093,13. Penurunan nilai pada belanja tidak langsung dikarenakan pengurangan nilai realisasi pada program belanja pegawai sebesar Rp1.039.470.831.796,07 dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp1.212.343.648.232,00, lalu menurunnya juga realisasi belanja bunga pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp9.906.889,91 dimana tahun lalu terealisasi sebesar Rp49.643.316,52, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp680.000.000,00 dimana tahun lalu terealisasi sebesar Rp1.592.000.000,00. Penurunan pada nilai realisasi belanja tidak langsung juga dipengaruhi karena adanya pengurangan terhadap anggaran dalam rencana kerja strategi yang telah ditetapkan untuk tahun 2015, dimana hal ini untuk meminimalisir penggunaan dana anggaran yang tidak memerlukan dana besar dalam belanja tidak langsung.

Pada tahun 2016 persentase rasio belanja tidak langsung Pemerintah Kota Samarinda mengalami kenaikan sebesar **45,08%**, nilai tersebut berbanding terbalik dengan pengurangan nilai belanja dari realisasi total belanja tidak langsung Pemerintah Kota Samarinda yang sebesar Rp1.051.278.461.542,00, hal serupa juga terjadi pada realisasi total belanja daerah yang mengalami penurunan serupa sebesar Rp2.331.928.898.582,64, sehingga pengurangan realisasi yang terjadi pada total belanja tidak langsung dan total belanja daerah mempengaruhi pencapaian tingkat rasio pada belanja tidak langsung. Penurunan yang terjadi pada realisasi belanja tidak langsung dikarenakan berkurangnya realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.016.852.128.034,57, dan belanja hibah Rp31.691.725.000,00, serta pengurangan tersebut dikarenakan adanya anggaran yang ditiadakan untuk beberapa program belanja tidak langsung seperti belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain ditiadaknya beberapa program belanja tidak langsung, pada tahun 2016 ini pemerintah Kota Samarinda meminimalisir pengurangan anggaran yang tersedia guna memfokuskan program yang memang perlu untuk dimaksimalkan kegiatannya, seperti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana masing-masing daerah harus melakukan penghematan dalam pelaksanaan belanja kegiatannya guna agar tiap daerah dapat meningkatkan kinerja yang efektif.

Rasio Efisiensi Belanja

Pada tahun 2014 tingkat rasio efisiensi belanja daerah Kota Samarinda mencapai **82,28%**, nilai tersebut jika dikategorikan dalam kriteria tingkat efisiensi belanja maka dikatakan cukup efisien dalam merealisasikan anggaran yang tersedia dalam memenuhi target anggaran, dimana anggaran yang direncanakan pada tahun 2014 sebesar Rp3.890.928.664.090,00, dan penggunaan dana belanja yang terealisasi sebesar Rp3.201.662.936.936,86. Belanja terbesar terdapat pada belanja operasi yaitu sebesar Rp1.878.908.770.615,86, dimana dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Kemudian belanja modal sebesar Rp1.322.656.294.646,00, modal tersebut digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya, dan belanja tak terduga sebesar Rp97.871.675,00.



Pada tahun 2015, tingkat rasio efisiensi belanja pemerintah Kota Samarinda mencapai **79,67%**, dimana pada tahun ini pemerintah dapat dikategorikan efisien dalam merealisasikan anggaran yang tersedia. Pada tahun ini pemerintah menetapkan target anggaran sebesar Rp4.063.842.554.801,48, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp3.237.540.741.278,13. Belanja operasi tetap menjadi belanja terbesar pada tahun 2015 bahkan pada tahun ini nilai belanja operasi naik dari tahun lalu yaitu sebesar Rp2.027.136.296.511,36, hal ini karena dana yang dianggarkan untuk belanja operasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.331.686.227.064,48, serta meningkatnya juga alokasi untuk belanja barang dan jasa, dan belanja hibah.

Pada tahun 2016, kriteria tingkat rasio efisiensi belanja pemerintah Kota Samarinda mencapai **88,34%**, pencapaian tersebut dapat dikatakan kinerja pemerintah Kota Samarinda cukup efisien dalam mengelola anggaran belanja daerahnya. Pada tahun ini pemerintah Kota Samarinda mengurangi jatah anggaran karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dimana masing-masing daerah mengalami pembatasan dalam penggunaan realisasi anggaran dalam rangka untuk melakukan penghematan ekonomi pada saat itu.

Rasio Pertumbuhan SiLPA Tahun Lalu

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Samarinda memperoleh realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp2.845.036.423.374,66, kemudian realisasi jumlah belanja sebesar Rp3.201.662.936.936,86, sehingga pemerintah memperoleh keuangan defisit sebesar Rp356.626.513.562,20. Namun pada tahun 2014 Pemerintah Kota Samarinda memperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp842.496.480.773,74, dan mengeluarkan realisasi pembiayaan sebesar Rp333.549.719,06, sehingga Pemerintah Kota Samarinda memperoleh pembiayaan neto sebesar Rp842.162.931.054,68. **Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Samarinda menghasilkan nilai SiLPA sebesar Rp485.536.417.492,48**, hal ini karena pada hasil pembiayaan neto lebih besar penerimaannya mencapai Rp842.162.931.054,68, sehingga dapat menutup defisit anggaran sejumlah Rp356.626.513.562,20.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Samarinda memperoleh pendapatan sebesar Rp2.859.356.289.674,01 kemudian jumlah belanja naik sebesar Rp3.237.540.741.278,13, sehingga pemerintah mengalami defisit sebesar Rp379.204.831.419,12. Namun pada tahun 2015 Pemerintah memperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp485.536.417.492,48, dan mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp32.873.985.965,47, sehingga memperoleh pembiayaan neto sebesar Rp452.662.431.527,01. **Nilai SiLPA pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2015 sebesar Rp73.457.600.107,89**, hal ini karena hasil pembiayaan neto yang diperoleh lebih besar penerimaannya mencapai Rp452.662.431.527,01, sehingga dapat menutup defisit anggaran sejumlah Rp379.204.831.419,12.

Pada tahun 2016, walaupun pemerintah daerah Kota Samarinda mengalami pengurangan dalam hal anggaran yang ditetapkan, namun pemerintah dapat mendapatkan surplus anggaran sebesar Rp105.697.750.806,33, hal ini adalah sebuah kemajuan dibandingkan pada dua tahun sebelumnya karena **pada tahun 2016 pemerintah Kota Samarinda menghasilkan pendapatan daerah sebesar Rp2.437.626.649.388,97, dan belanja lebih rendah yaitu sebesar Rp2.331.928.898.582,64. Pada tahun 2016 tidak adanya pengeluaran pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dan serta diperolehnya penerimaan pembiayaan sebesar Rp73.457.600.107,89, sehingga pemerintah dapat menghasilkan SiLPA sebesar Rp179.155.350.914,22.**

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio pertumbuhan pendapatan pada pemerintah daerah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 memiliki rata-rata pertumbuhan pendapatan yang negatif sebesar -1,16% dan kecendrungan (*trend*) menurun karena kebergantungan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah kota Samarinda selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak bergantung pada pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.
2. Rasio derajat desentralisasi pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 memiliki rata-rata 15,35%, pencapaian tersebut masih dalam skala interval yang dapat dikatakan kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 10,01 – 20,00. Hal ini



dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat, sehingga perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) mempengaruhi tingkat desentralisasi fiskal.

3. Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 memiliki rata-rata sebesar 76,59%, dalam hal ini ketergantungan pemerintah daerah Kota Samarinda masih sangat tinggi terhadap bantuan dari pendapatan transfer pemerintah pusat, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah.
4. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 memiliki rata-rata sebesar 20,54%, yang artinya masih rendah sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan daerah dengan pola hubungan *instruktif* yaitu peranan pemerintah pusat maupun provinsi lebih dominan daripada kemandirian pemerintah Kota Samarinda. Dengan demikian diperlukan usaha lebih besar lagi dari pemerintah Kota Samarinda untuk dapat mengurangi ketergantungan yang sampai saat ini masih dikelola pemerintah pusat.
5. Analisis rasio efektifitas PAD pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 memiliki rata-rata sebesar 70,17%. Pemerintah daerah Kota Samarinda masih dikatakan kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan yang ditentukan, sebab pemerintah tidak dapat mencapai realisasi penerimaan yang ditargetkan. Berbagai kemungkinan kurang efektifnya pemerintah daerah Kota Samarinda dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah masih belum mampunya daerah dalam menyediakan aparatur-aparatur daerah yang berkompeten di bidang manajemen keuangan daerah, masih tingginya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di daerah, kurang disiplinnya aparatur-aparatur daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum jelas kedudukan hukumnya di daerah dan infrastruktur yang masih belum mendukung, serta masih besarnya bantuan dari pemerintah pusat.
6. Analisis rasio pertumbuhan belanja pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 memiliki rata-rata sebesar -5,09%. Pada periode tersebut pemerintah Kota Samarinda setiap tahunnya mengalami penurunan dalam hal membelanjakan kegiatannya, hal ini karena adanya pengurangan anggaran pada tiap tahunnya serta adanya kegiatan yang tidak perlu dibelanjakan seperti belanja bunga dan belanja bantuan sosial.
7. Analisis rasio belanja langsung pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 adalah sebesar 96,01%. Hal ini sesuai bahwa semestinya belanja langsung nilainya lebih besar daripada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas kegiatan *output* pemerintah daerah Kota Samarinda. Dengan meningkatnya rasio belanja langsung tiap tahunnya, maka dapat dikatakan adanya keserasian pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.
8. Analisis rasio belanja tidak langsung pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 adalah sebesar 41,84%. Nilai ini sudah baik karena nilai belanja tidak langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja langsung. Namun jika dilihat dari data yang ada, dalam merealisasikan anggaran pemerintah daerah Kota Samarinda mengalokasikan lebih besar kepada belanja pegawai dibandingkan belanja lainnya seperti belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
9. Analisis rasio efisiensi belanja daerah pada pemerintah Kota Samarinda selama periode 2014-2016 terlihat stabil yaitu mencapai 83,43% dan termasuk dalam kriteria cukup efisien, hal ini dibuktikan dengan perolehan tingkat efisiensi belanja daerah dibawah atau kurang dari 100% dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien.
10. Analisis rasio pertumbuhan SiLPA pada pemerintah Kota Samarinda selama tahun periode 2014-2016 menunjukkan *trend* yang positif, namun trend tersebut tidak diikuti dengan perkembangan fiskal yang baik. Perolehan SiLPA tahun berjalan dari 2014-2016 selalu memperoleh saldo yang positif dikarenakan lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal, sehingga Pemerintah Kota Samarinda



perlu menutup kekurangan SiLPA tersebut dari adanya penerimaan pembiayaan neto yang lebih besar agar memperoleh SiLPA tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak instansi khususnya Pemerintah Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Rasio pertumbuhan pendapatan yang menurun merupakan pertanda bahwa pemerintah kurang mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah kota Samarinda selalu mengefektifkan dan mengoptimalkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Selain itu pemerintah daerah Kota Samarinda melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjangking wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.
2. Derajat desentralisasi fiskal yang kurang merupakan pertanda bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang sangat tepat dari segala aspek pemerintahan untuk membenahi hal ini. Derajat desentralisasi yang kecil secara langsung juga dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang kecil, dari sini pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Inovasi dan kreatifitas daerah sangat diperlukan dalam hal ini, sehingga seharusnya komponen Pendapatan Asli Daerah yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi.
3. Rasio ketergantungan daerah daerah Kota Samarinda masih sangat tinggi terhadap bantuan dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah pada pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan terhadap dari bantuan pemerintah pusat sehingga pemerintah Kota Samarinda dapat melaksanakan kegiatan otonomi daerah secara maksimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
4. Rasio kemandirian yang masih rendah sekali mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Samarinda dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan rendahnya kemandirian pemerintah Kota Samarinda, diharapkan pemerintah dapat melakukan perbaikan kinerja keuangan untuk meminimalisir peranan pemerintah pusat maupun provinsi dengan memaksimalkan kinerja terhadap pencapaian pendapatan asli daerah terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
5. Rasio efektifitas PAD pada pemerintah Kota Samarinda masih dikatakan kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan yang ditentukan, sebab pemerintah tidak dapat mencapai realisasi penerimaan yang ditargetkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Samarinda lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan daerah. Upaya intensifikasi dapat berupa meningkatkan pengawasan wajib pajak, meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah, seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan pendataan terhadap objek maupun subjek pajak dan retribusi daerah dan bila perlu merevisi serta merubah peraturan daerah yang sudah kadaluarsa menjadi peraturan daerah baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan tahun sekarang ini.
6. Rasio pertumbuhan belanja yang menurun terjadi karena anggaran yang direalisasikan tidak terlalu diprioritaskan. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bisa dihilangkan dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal terjaga. Sehingga pemerintah daerah Kota Samarinda dapat memfokuskan dana belanja daerah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan infrastruktur daerah.
7. Rasio belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas kegiatan *output* pemerintah daerah Kota Samarinda. Dengan meningkatnya rasio belanja langsung tiap tahunnya, maka dapat



- dikatakan adanya keserasian pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja langsung. Oleh karena itu, diharapkan selain meningkatkan PAD, pemerintah daerah Kota Samarinda juga dapat lebih meningkatkan belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung, karena belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kota Samarinda, sehingga peningkatan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
8. Rasio Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Samarinda meminimalisir pengurangan anggaran yang tersedia guna memfokuskan program yang memang perlu untuk dimaksimalkan kegiatannya, seperti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana masing-masing daerah harus melakukan penghematan dalam pelaksanaan belanja kegiatannya guna agar tiap daerah dapat meningkatkan kinerja yang efektif.
 9. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran pemerintah daerah Kota Samarinda. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Samarinda diharapkan agar selalu menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan pemerintah dengan memanfaatkan anggaran belanja lebih efisien lagi khususnya pada pembangunan infrastruktur umum. Jika infrastruktur umumnya baik maka kegiatan ekonomi dapat terus berjalan lancar yang akan berdampak baik pada pembangunan daerah.
 10. Rasio pertumbuhan SiLPA yang positif menandakan bahwa ada pembiayaan neto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, sehingga masih adanya realisasi anggaran yang tersisa. Atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk menutup kekurangan anggaran pada tahun berkenan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat lebih meningkatkan pendapatannya daripada belanja sehingga menghasilkan surplus serta mendapatkan SiLPA pada akhir periode tanpa adanya penambahan nilai dari pembiayaan neto.

Daftar Pustaka

- Andayani, Winarti. 2004. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* 5 (1).
- Ariana, Hermawati. 2013. Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Publikasi Ilmiah* 1 (1), 23-37.
- Badan Litbang Depdagri RI, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Bisma, I Dewa Gede dan Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2007. *Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____, 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda nomor 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pasal 20 ayat 1.



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratiwi, Yuri. 2014. Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan 2 (1)*, 59-72.
- Redaksi Great Publisher. 2009. *Buku Pintar Politik; Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Jogja Great Publisher. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Purnama. 2017. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar 2 (2)*, 179-187.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. IKAPI. Bandung.
- Suprpto, Heru. 2016. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Sampai 2014. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia 16 (1)*, 46-59.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.